

Siaran Pers

SEMINAR NASIONAL INOVASI DAERAH “PEMBANGUNAN INOVATIF, PEMIMPIN KREATIF, DAN DAERAH KOMPETITIF”

JAKARTA (11/1) – Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Kedutaan Australia melalui *Knowledge Sector Initiative* (KSI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Pembangunan Inovatif, Pemimpin Kreatif, dan Daerah Kompetitif”. Seminar nasional yang diselenggarakan Kedepuitan Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas ini bertujuan untuk menciptakan forum lintas pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berbagi pengalaman mengenai praktik cerdas (*smart practices*) yang berhasil dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pembangunan yang berkesinambungan. Hadir sebagai narasumber untuk menyajikan sejumlah praktik cerdas daerah adalah Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Denny Juanda Puradimadja, yang dianggap telah berhasil menerapkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida juga hadir untuk memberikan perspektif pelayanan publik terkait keberhasilan pelaksanaan inovasi daerah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan penyelenggaraan Seminar Nasional Inovasi Daerah tersebut dapat mencapai setidaknya dua tujuan sekaligus. *Pertama*, forum ini akan menjadi stimulus dalam pengintegrasian kebijakan inovasi daerah di tataran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama aktor-aktor pembangunan lainnya. Sinergi dan harmonisasi kebijakan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan inovasi daerah penting untuk mencapai *output* dan *outcome* pembangunan yang lebih optimal. *Kedua*, menjadikan daerah-daerah yang melaksanakan *smart practices* sebagai teladan dan contoh sehingga pelaksanaan inovasi yang dinilai berhasil dapat diduplikasi dan diimplementasikan oleh daerah-daerah lainnya. “Saya berharap forum ini juga dapat menghasilkan masukan strategis dalam penyusunan kebijakan inovasi daerah bersifat holistik-tematik, integratif dan spasial, terutama untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran nasional serta daerah mengingat integrasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran penting untuk menjamin keberlanjutan inovasi daerah,” ungkap Menteri Bambang.

Dalam seminar nasional ini, disajikan hasil kajian “Analisis Kebijakan Inovasi Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah” yang dilaksanakan oleh Kedepuitan Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas pada 2016 di empat provinsi dan delapan kabupaten/kota. Sejumlah faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan pengembangan inovasi daerah, di antaranya kepemimpinan kepala daerah, kapasitas aparatur pemerintah, partisipasi aktif masyarakat dan implementasi regulasi. “Sementara itu, faktor penghambat inovasi daerah adalah tidak adanya kepastian hukum tentang inovasi untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan inovasi daerah, kebijakan lintas *stakeholder* yang masih bersifat parsial, dan kebijakan inovatif yang tidak diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran,” tutur Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Dalam seminar ini, perwakilan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut hadir untuk berbagi pengalaman tentang dampak inovasi bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bisnis. Pemerintah Australia mengakui pentingnya inovasi sebagai penggerak daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan standar hidup sebagai tujuan akhir. Melalui Agenda Nasional Inovasi dan Sains, Australia merangkul ide-ide baru dan memanfaatkan sumber pertumbuhan baru untuk memberikan kemakmuran ekonomi berlanjut bagi

Australia. Hal ini dilengkapi dengan pengakuan bahwa pertumbuhan perlu dipimpin oleh inovasi, serta didorong oleh tindakan kewirausahaan dan terobosan-terobosan baru. "Pemerintah Australia, melalui KSI, mendukung Bappenas untuk memperkuat Pusat Pengetahuan (*Knowledge Center*) dalam mengembangkan sistem yang menghimpun praktik cerdas dari seluruh daerah di Indonesia sehingga dapat diperluas penerapannya di daerah lain," ujar *Counsellor for Poverty and Social Development DFAT* Nicola Nixon.

Sebagai rangkaian dari seminar tersebut, diskusi publik dalam format bincang-bincang dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenristekdikti, BPPT, Kementerian PAN/RB, dan LAN, yang menyampaikan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong pelaksanaan inovasi di daerah serta merespons praktik cerdas inovasi daerah yang telah dilakukan sejauh ini. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang inovatif harus hadir sebagai solusi yang efektif dan efisien untuk menjawab permasalahan di daerah dengan melibatkan semua elemen pembangunan, mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, badan usaha dan swasta, perguruan tinggi, masyarakat madani, serta lembaga nonpemerintah lainnya. ■

Tentang *Knowledge Sector Initiative (KSI)*

KSI adalah sebuah program kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang berbasis pada penelitian, analisa dan bukti. Dukungan KSI terhadap Bappenas telah diselenggarakan sejak 2013 melalui tim Analisis Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas. Informasi lebih lanjut mengenai KSI dapat diakses di situs <http://www.ksi-indonesia.org/>

Jakarta, 11 Januari 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650
Faksimile (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id